PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN LANDU LEKO

KABUPATEN ROTE NDAO

2019 - 2024

N A U L A O R
DESA DAIMA
www..rotendaokab.go.id
2021

KATA PENGANTAR

Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, maka Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dapat terselesaikan.

Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Landu Leko Tahun 2019-2024 ini merupakan serangkaian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan mendasar yang dibuat dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang realistis.

Kami menyadari bahwa Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 ini masih jauh dari penyempurnaan, namun demikian agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah bersama semua pemangku kepentingan dalam menggalakkan pembangunan disegala bidang dalam wilayah Kecamatan Landu Leko demi mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang bermartabat, berkelanjutan, sejahtera lahir dan batin.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Rancangan Perubahan Renstra ini kami ucapkan terima kasih.

Naulaor, 28 Desember 2021

Camat Landu Leko,

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LANDU LEKO

JOSTAF FAAH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 196403111986031014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**
Daftar Isi ..... **ii**
Daftar Tabel ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN OPD **7**
2.1 Gambaran Umum Pelayanan OPD Kecamatan Landu Leko 7
2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Landu Leko 12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 19

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS **21**
3.1 Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD 21
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan WKDH Terpilih 22
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah RPJMD 24
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LH Strategis 27
3.5 Penetapan Isi-isu Strategis 29

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **31**
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kec. Landu Leko 32
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD 32
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN **33**
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN **35**
BAB VII INDIKATOR KINERJA **39**
BABVIII PENUTUP **40**

DAFTAR TABEL

Tabel – 2.1 Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, dan Pangkat/ Golongan 13

Tabel – 2.2 Sarana dan Prasarana Kec. Landu Leko Kab. Rote Ndao Tahun 2020 14

Tabel – 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Landu Leko Kab. Rote Ndao 15

Tabel – 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Kec. Landu Leko 16

Tabel – 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 22

Tabel – 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Pencapaian Visi Misi 22

Tabel – 3.3 Permasalahan Pelayanan Kec. Landu Leko Kab. Rote Ndao berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya 26

Tabel – 3.4 Permasalahan Pelayanan Kec. Landu Leko Kab. Rote Ndao berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong 27

Tabel – 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kec. Landu Leko 32

Tabel – 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 34

Tabel – 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kec. Landu Leko..... 36

Tabel – 7.1 Indikator Kinerja Kec. Landu Leko yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi yang diamanatkan kepada Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao yaitu fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor ….. Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, maka Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam urusan pemerintahan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan kemasyrakatan, harus menyusun Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao terpilih.

Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan Rancangan Awal; (3) penyusunan Rancangan; (4) penyusunan Rancangan Akhir; dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Renstra Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 mengacu pada Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Perubahan Renstra Bapelitbang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2021 dan Renja 2022-2024 Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao.

Perubahan Renstra Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 merupakan perubahan dokumen renstra sebelumnya yang telah disusun. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor dan pertimbangan, antara lain :

a. Terjadinya perubahan kebijakan RPJMD, mengakibatkan perubahan terhadap Renstra Kecamatan Landu Leko;
b. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi, Penyempurnaan tujuan, sasaran indicator dan target kinerja Kecamatan Landu Leko;

c. Terdapat kebijakan nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah; dan

d. Dampak Pandemi covid-19 berupa refocusing dan realokasi anggran serta perubahan kondisi ekonomi makro, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pembangunan.

Dengan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 maka Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas pelayaanan kemasyarakatan di Kecamatan Landu Leko. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Landu Leko Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor …. Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
18. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao;
19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Landu Leko yang memuat arah tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu lima tahun dalam mendukung visi dan misi kepala daerah.

1.3.2. Tujuan

Perubahan Rentra Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 209-2024 disusun dengan tujuan ;

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indicator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao.
2. Sebagai dasar penyusunan Renja Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao.
3. Sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Landu Leko baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renstra Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup :

1.1 latar belakang : mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.

1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup:

2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah : memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber daya Perangkat Daerah : memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah : bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup:

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah : pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih : bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

3.3 Telaahan renstra Kemeterian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah prov/kab/Kabupaten lain : bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis : pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan isu-isu strategis : pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

5.1. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi

5.2. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LANDU LEKO KAB. ROTE NDAO

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Landu Leko Kab. Rote Ndao

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 45 Tahun 2016 Tanggal 08 Nopember 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan :

1. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao di atas, maka susunan organisasi Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN LANDU LEKO KABUPATEN ROTE NDAO

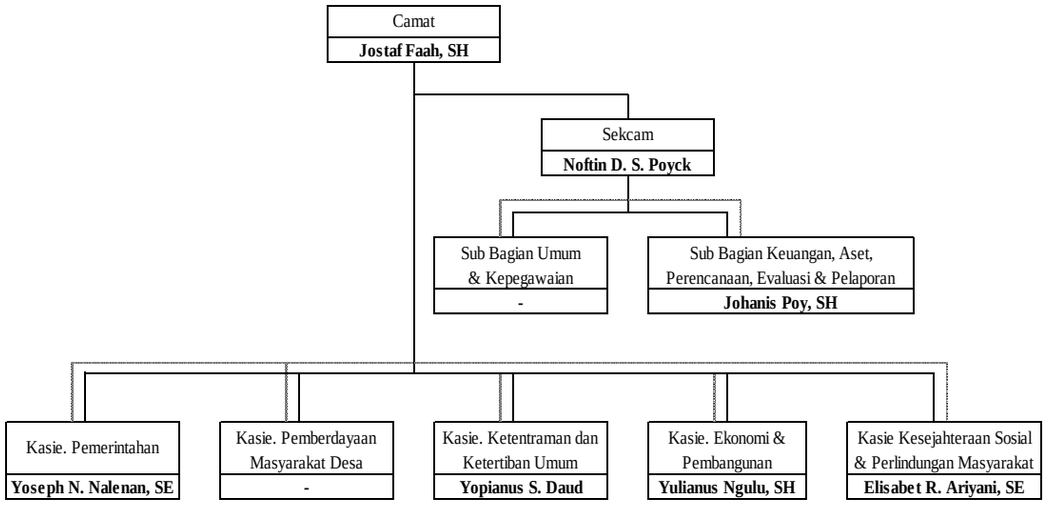

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Landu Leko

1. Camat

Struktur Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh Camat, dibantu Sekretariat, dan 5 Kepala Seksi yakni :

a. Kepala Seksi Pemerintahan

b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

c. Kepala Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum

d. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

e. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat

2. Sekretaris

Sekretaris Membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Landu Leko berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Sedangkan fungsi Camat dalam pemerintahan sebagai berikut :

a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan.

b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan peraturan perundang – undangan dan pemeliharaan sarana / prasarana fasilitas umum di kecamatan.

c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan disekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Perlindungan Masyarakat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang – undangan terkait dengan tugas dan fungsinya

2. **Sekreatris Kecamatan**

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, asset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan operasional secretariat berdasarkan rencana program kecamatan.
b. Pelaksanaan kebijakan operasional di sekretariat
c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasi, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Fungsi :

a. Perencanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional sekretariat.
b. Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Pembagian Tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
d. Pelaksanaan urusan penatausahaan, surat – menyurat, rumah tangga kecamatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi kepada pimpinan.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

4. **Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan, asset perencanaan, evaluasi dan pelaporan,

memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan kegiatan di Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional sekretaris.
b. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
d. Pelaksanaan urusan penatausahaan keuangan, asset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
e. Pelaksanaan urusan penatausahaan keuangan, asset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan. Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan di Seksi Pemerintahan berdasarkan rencana operasional kecamatan.
b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemerintahan.
c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pemerintahan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan rencana operasional kecamatan.
b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan rencana operasional kecamatan.
b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Ekonomi dan Pembangunan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan di Seksi Ekonomi dan Pembangunan berdasarkan rencana operasional kecamatan.
b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

9. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan di Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan rencana operasional kecamatan.
b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat.
c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat sebagai pertanggungjawan pelaksanaan tugas.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Landu Leko

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh satu Instansi/Badan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja Instansi/Badan tersebut. Komposisi sumber daya aparatur Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, dan Pangkat/Golongan

No	Jabatan	ESELON				GOLONGAN				PENDIDIKAN					DIKLAT PIM			JUMLAH
		II	III	1V	V	IV	III	II	I	S1	D3	SMA	SMP	SD	II	III	IV	
1	Camat	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris Camat	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kasubag. Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Kasie. Pemerintahan	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Kasie. Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kasie. Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Kasie. Ekonomi dan Pembangunan	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Kasie. Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Pelaksana	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3
	TOTAL	**-**	**2**	**5**	**-**	**2**	**5**	**1**	**-**	**9**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**

Sumber : Kecamatan Landu Leko

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Kecamatan Landu Leko Kab. Rote Ndao Tahun 2020

No	Nama Barang	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Station Wagon	1	1		
2	Sepeda Motor	4	4		
2	Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	1			1
3	Microphone Floor Stand	1	1		
4	Lemari kayu	1	1		
5	Papan Pengumunan	2	1		
6	Genset	1	1		
7	Meja Kayu/Rotan	10	10		
8	Mimbar Podium	1	1		
9	Wireless	2	2		
10	Tandon Air	1	1		
11	Lap Top	3	3		
12	Printer	2	2		
13	UPS	2		1	1
14	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	100	100		
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1		
15	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	2	2		
17	Jaringan Transmisi Tegangan Di Atas 300 KVA	3		3	
TOTAL		**138**	**131**	**4**	**2**

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Landu Leko

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada table 2.3 dan 2.4

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Landu Leko
Kabupaten Rote Ndao

NO	Indikator Kinerja Kegiatan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Landu Leko	Trget NSPK	Target IKK	Target Indikator ainnya	Target Renstra Kecamatan Landu Leko Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat (%)		√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan (%)		√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan hasil table 2.3 di atas diketahui bahwa indikator perencanaan pembangunan daerah telah tercapai tetapi masih terdapat beberapa faktor penghambat antara lain :

1. Penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan, serta toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf.
2. Tindak lanjut dari aturan-aturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan belum konsisten. Seringkali regulasi atau produk hukum pusat yang begitu cepat mengalami penyesuaian tidak dibarengi dengan produk hukum dibawahnya sehingga seringkali banyak tafsir tentang sebuah regulasi terjadi ditingkat bawah.
3. Kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif.

Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini :

TABEL 2.4

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LANDU LEKO

KABUPATEN ROTE NDAO

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**Pendapatan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Belanja Tidak Langsung**	**962,123,900**	**1,300,547,650**	**1,249,157,020**	**1,380,241,210**	**1,333,283,000**	**953,260,520**	**1,237,193,328**	**1,226,176,508**	**1,212,288,262**	**1,333,283,000**	**99**	**95**	**98**	**88**	**100**	**0.10**	**0.09**
	- Belanja Pegawai	962,123,900	1,300,547,650	1,249,157,020	1,380,241,210	1,333,283,000	953,260,520	1,237,193,328	1,226,176,508	1,212,288,262	1,333,283,000	99	95	98	88	100	0.10	0.09
	Gaji dan Tunjangan	*901,223,900*	*1,230,047,650*	*1,178,357,020*	*1,262,691,210*	*1,193,483,000*	*898,651,145*	*1,168,245,828*	*1,155,946,258*	*1,100,245,762*	*1,193,483,000*	100	95	98	87	100	0.10	0.08
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	680,566,906	916,642,285	889,899,465	944,647,465	915,831,278	679,483,400	887,936,900	894,788,900	841,481,200	915,831,278	100	97	101	89	100	0.08	0.09
	Tunjangan Keluarga	76,746,360	98,481,085	95,507,284	95,507,284	101,474,073	76,382,294	95,902,184	94,372,208	93,716,400	101,474,073	100	97	99	98	100	0.09	0.08
	Tunjangan Jabatan	43,342,000	64,493,000	55,900,000	63,340,000	55,391,000	43,350,000	61,120,000	64,540,000	62,860,000	55,391,000	100	95	115	99	100	0.08	0.08
	Tunjangan Fungsional Umum	31,815,375	39,430,000	50,862,500	50,862,500	39,032,000	31,815,000	36,600,000	35,135,000	35,300,000	39,032,000	100	93	69	69	100	0.09	0.06
	Tunjangan Beras	55,955,136	81,669,790	66,807,450	66,807,450	61,462,854	55,288,720	66,771,240	64,308,960	59,094,720	61,462,854	99	82	96	88	100	0.07	0.03
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12,656,556	29,301,386	19,305,285	19,305,285	13,041,809	12,316,121	19,900,154	2,787,320	1,397,453	13,041,809	97	68	14	7	100	0.05	1.90
	Pembulatan Gaji	141,567	30,104	75,036	75,039	75,068	15,610	15,350	13,870	14,457	75,068	11	51	18	19	100	0.16	1.03
	Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				22,146,187	7,174,918				6,381,532	7,174,918	-	-	-	29	100	0.18	0.03
	Tambahan penghasilan PNS	*60,900,000*	*70,500,000*	*70,800,000*	*117,550,000*	*139,800,000*	54,609,375	68,947,500	70,230,250	112,042,500	*139,800,000*	90	98	99	95	100	(0.17)	0.28
	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	60,900,000	70,500,000	70,800,000	117,550,000	139,800,000	54,609,375	68,947,500	70,230,250	112,042,500	139,800,000	90	98	99	95	100	0.25	0.28
3	**Belanja Langsung**	**327,714,103**	**342,714,103**	**344,999,703**	**430,008,000**	**395,000,000**	**322,211,300**	**338,702,850**	**324,083,300**	**395,248,300**	**395,000,000**	**98**	**99**	**94**	**92**	**100**	**0.25**	**0.06**
	- Belanja Pegawai	**39,720,000**	**43,980,000**	**50,880,000**	**54,096,000**	**54,096,000**	**39,720,000**	**43,980,000**	**48,880,000**	**54,096,000**	**54,096,000**	**100**	**100**	**104**	**100**	**100**	**0.05**	**0.08**
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	**39,720,000**	**38,880,000**	**38,880,000**	**42,096,000**	**42,096,000**	**39,720,000**	**38,880,000**	**38,880,000**	**42,096,000**	**42,096,000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0.08**	**0.02**
	Honorarium Pengelola APBD	39,720,000	38,880,000	38,880,000	42,096,000	42,096,000	39,720,000	38,880,000	38,880,000	42,096,000	42,096,000	100	100	100	100	100	0.02	0.02
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		**5,100,000**					**5,100,000**				**-**	**100**				**-**	**(0.25)**
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		5,100,000					5,100,000					100				(0.25)	(0.25)
	Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan			**12,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**			**10,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**	**-**	**-**	**83**	**100**	**100**	**-**	**0.05**
	Honnorarium PNS			12,000,000	12,000,000	12,000,000			10,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-	83	100	100	-	0.05

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Belanja Barang dan Jasa	**274,518,103**	**285,380,103**	**280,765,703**	**341,298,000**	**340,904,000**	**269,015,300**	**281,368,850**	**261,849,300**	**327,798,300**	**340,904,000**	**98**	**101**	**107**	**104**	**104**	**-**	**0.07**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**1,155,000**	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,151,000	1,155,000	1,154,000	1,155,000	1,155,000	100	100	100	100	100	0.06	0.00
	Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,151,000	1,155,000	1,154,000	1,155,000	1,155,000	100	100	100	100	100	-	0.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	**10,946,200**	**9,946,200**	**9,946,200**	9,946,000	9,946,000	**10,940,000**	9,942,000	9,920,000	9,946,000	9,946,000	100	100	100	100	100	-	(0.02)
	Belanja Bahan bakar Minyak / Gas	10,946,200	9,946,200	9,946,200	9,946,000	9,946,000	10,940,000	9,942,000	9,920,000	9,946,000	9,946,000	100	100	100	100	100	(0.02)	(0.02)
	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional	**2,000,000**	**2,200,000**	**2,200,000**	**2,500,000**	**2,500,000**	**1,862,500**	**1,141,500**	**1,244,000**	**103,200**	**2,500,000**	**93**	**52**	**57**	**4**	**100**	**-**	**5.50**
	Belanja Pajak kendaraan bermotor	2,000,000	2,200,000	2,200,000	2,500,000	2,500,000	1,862,500	1,141,500	1,244,000	103,200	2,500,000	93	52	57	4	100	0.06	5.50
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	**2,200,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,200,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**	**(0.02)**
	Belanja peralatan kebersihan & bahan pembersih	2,200,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,200,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100	100	100	100	100	(0.02)	(0.02)
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	**10,781,303**	**12,014,653**	**8,345,403**	**8,417,000**	**8,412,000**	**10,781,000**	**12,010,000**	**8,205,000**	**8,400,000**	**8,412,000**	**100**	**100**	**98**	**100**	**100**	**-**	**(0.04)**
	Belanja alat tulis kantor	10,781,303	12,014,653	8,345,403	8,417,000	8,412,000	10,781,000	12,010,000	8,205,000	8,400,000	8,412,000	100	100	98	100	100	(0.05)	(0.04)
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	**5,318,100**	**4,500,000**	**4,500,000**	**4,200,000**	**4,200,000**	**5,302,000**	**4,498,100**	**4,422,000**	**4,200,000**	**4,200,000**	**100**	**100**	**98**	**100**	**100**	**-**	**(0.05)**
	Belanja cetak dan pergandaan	5,318,100	4,500,000	4,500,000	4,200,000	4,200,000	5,302,000	4,498,100	4,422,000	4,200,000	4,200,000	100	100	98	100	100	(0.06)	(0.05)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	**2,000,000**	**1,820,000**	**3,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**1,790,000**	**1,820,000**	**1,640,000**	**180,000**	**2,000,000**	**90**	**100**	**55**	**9**	**100**	**-**	**2.28**
	Belanja Langganan Surat Kabar / Majalah	2,000,000	1,820,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	1,790,000	1,820,000	1,640,000	180,000	2,000,000	90	100	55	9	100	0.06	2.28
	Penyediaan Makan minum Kantor	**12,000,000**	**10,500,000**	**11,500,000**	**8,500,000**	**-**	**12,000,000**	**10,500,000**	**11,500,000**	**8,100,000**	**-**	**100**	**100**	**100**	**95**	**-**	**-**	**(0.33)**
	Belanja Makanan dan Minuman Kantor	12,000,000	10,500,000	11,500,000	8,500,000		12,000,000	10,500,000	11,500,000	8,100,000		100	100	100	95	-	(0.32)	(0.33)
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	**19,760,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,427,700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0.25)**
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19,760,000	-				17,427,700					88	-	-	-	-	(0.25)	(0.25)
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	**75,175,000**	**82,760,000**	**64,050,000**	**98,500,000**	**102,550,000**	**75,100,000**	**82,550,000**	**63,900,000**	**98,100,000**	**102,550,000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**	**0.11**
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75,175,000	82,760,000	64,050,000	98,500,000	102,550,000	75,100,000	82,550,000	63,900,000	98,100,000	102,550,000	100	100	100	100	100	0.11	0.11
	Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT	**18,630,000**	**21,070,000**	**31,605,000**	**41,690,000**	**29,750,000**	**17,680,000**	**19,830,000**	**30,130,000**	**41,690,000**	**29,750,000**	**95**	**94**	**95**	**100**	**100**	**-**	**0.18**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,630,000	21,070,000	31,605,000	41,690,000	29,750,000	17,680,000	19,830,000	30,130,000	41,690,000	29,750,000	95	94	95	100	100	0.17	0.18

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**64,952,500**	**44,683,500**	**38,183,500**	**47,183,000**	**38,183,000**	**64,938,400**	**44,591,500**	**33,085,000**	**47,131,000**	**38,183,000**							
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	**64,952,500**	**44,683,500**	**38,183,500**	**47,183,000**	**38,183,000**	**64,938,400**	**44,591,500**	**33,085,000**	**47,131,000**	**38,183,000**	**100**	**100**	**87**	**100**	**100**	**-**	**(0.08)**
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64,952,500	44,683,500	38,183,500	47,183,000	38,183,000	64,938,400	44,591,500	33,085,000	47,131,000	38,183,000	100	100	87	100	100	(0.10)	(0.08)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			**16,500,000**	**-**	**16,500,000**	**-**	**-**	**15,450,000**	**-**	**16,500,000**	**-**	**-**	**94**	**-**	**100**	**-**	**(0.25)**
	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM Aparatur			16,500,000		16,500,000			15,450,000	-	16,500,000	-	-	94	-	100	(0.25)	(0.25)
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	**16,500,000**	**16,826,750**	**17,500,000**	**37,500,000**	**37,500,000**	**16,494,500**	**16,826,750**	**17,500,000**	**36,500,000**	**37,500,000**	**100**	**100**	**100**	**97**	**100**	**-**	**0.29**
	Diklat Pasukan Pengibar Bendera	16,500,000	16,826,750	17,500,000	37,500,000	37,500,000	16,494,500	16,826,750	17,500,000	36,500,000	37,500,000	100	100	100	97	100	0.30	0.29
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	**22,000,000**	**21,000,000**	**36,000,000**	**34,500,000**	**34,500,000**	**20,348,200**	**19,700,000**	**32,594,300**	**27,545,100**	**34,500,000**	**92**	**94**	**91**	**80**	**100**	**-**	**0.18**
	Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan	22,000,000	21,000,000	36,000,000	34,500,000	34,500,000	20,348,200	19,700,000	32,594,300	27,545,100	34,500,000	92	94	91	80	100	0.16	0.18
	Program perencanaan pembangunan daerah	**-**	**42,404,000**	**17,285,600**	**27,506,000**	**27,507,000**	**-**	**42,404,000**	**17,285,000**	**27,506,000**	**27,507,000**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**	**(0.00)**
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	-	42,404,000	17,285,600	27,506,000	27,507,000		42,404,000	17,285,000	27,506,000	27,507,000	-	100	100	100	100	(0.00)	(0.00)
	Program Mengintensifkan Pelayanan Pengaduan Kemasyarakatan	**11,100,000**	**12,500,000**	**16,995,000**	**15,701,000**	**24,201,000**	**11,000,000**	**12,400,000**	**11,820,000**	**15,242,000**	**24,201,000**	**99**	**99**	**70**	**97**	**100**	**-**	**0.24**
	Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	11,100,000	12,500,000	16,995,000	15,701,000	24,201,000	11,000,000	12,400,000	11,820,000	15,242,000	24,201,000	99	99	70	97	100	0.24	0.24
	- Belanja Modal	**13,476,000**	**13,354,000**	**13,354,000**	**34,614,000**	**-**	**13,476,000**	**13,354,000**	**13,354,000**	**13,354,000**	**-**	100	100	100	39	-	-	(0.25)
	Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan jaringan Air Minum jaringan sambungan kerumah pengadaan meteran dan instalasi	13,476,000					13,476,000					100	-	-	-	-	0.15	(0.25)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair		13,354,000	13,354,000				13,354,000	13,354,000			-	100	100	-	-	(0.25)	(0.25)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer				13,354,000					13,354,000		-	-	-	100	-	(0.25)	(0.25)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua				21,260,000						-	-	-	-	-	-	(0.25)	-
	T o t a l	**1,289,838,003**	**1,643,261,753**	**1,594,156,723**	**1,810,249,210**	**1,728,283,000**	**1,275,471,820**	**1,575,896,178**	**1,550,259,808**	**1,607,536,562**	**1,728,283,000**	**99**	**96**	**97**	**89**	**100**	**(0.25)**	**0.08**

Berdasarkan hasil table 2.4 di atas dapat dijelaskan realisasi anggaran selama 5 tahun di atas 90%. Terdapat kegiatan yang realisasi fisik telah mencapai 100% namun realisasi anggaran tidak mencapai 100% untuk itu diperlukan perencanaan anggaran kegiatan yang lebih baik lagi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Landu Leko

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Bapelitbangda Provinsi NTT, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, untuk melihat implikasi masing- masing sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao pada lima tahun mendatang.

1. **Analisis Renstra Provinsi dan Renstra Perangkat Daerah**

   Analisis Renstra Bappelitbangda Provinsi NTT ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian pelaksanaan Renstra Kecamatan Landu Leko Kab. Rote Ndao terhadap Renstra Bappelitbangda Provinsi NTT sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Landu Leko.

2. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

   Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rote Ndao yang dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD Kab. Rote Ndao untuk diacu dalam penyusunan Renstra PD, namun tidak ada implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Landu Leko

3. **Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan PD**

   Program Daerah yang diturunkan menjadi program PD dalam Renstra PD dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan Awal RPJMD.

Berdasarkan kinerja pelayanan pada tabel 2.3, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Landu Leko berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao yaitu:

1. Dinamika regulasi dari pemerintah pusat dan provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi perencanaan pembangunan dan penentuan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

3. Masih dominannya unsur politis dalam pengambilan keputusan bidang perencanaan dan penganggaran sehingga menganggu tahapan dan proses perencanaan pembangunan
4. Belum optimalnya aplikasi Dokumen perencanaan dan suplai data dan informasi dari OPD terkait;
5. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat dinamis.

Sedangkan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah;
2. Ketersediaan Sarana prasarana yang didukung oleh perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur seperti E-Planning;
3. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN LANDU LEKO

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Landu Leko

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, perencanaan pembangunan. Berdasarkan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada umumnya kualitas penanganan permasalahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Rote Ndao masih dan terbatas dalam upaya pengendalian perencanaan pembangunan dari tingkat dusun, desa, kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai ke tingkat Nasional.

Kabupaten Rote Ndao saat ini telah dan selalu giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, melalui proses evaluasi dan penyempurnaan program-program kerja yang dilaksanakan terhadap RPJMD. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao dilakukan berdasarkan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao 2019-2024. Untuk menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik Kecamatan Landu Leko	Keterbatasan kualitas dan kualifikasi SDM	Kurangnya pemberdayaan SDM aparatur
2	Masih rendahnya kesadaran terhadap permasalahan hukum	Kurangnya sosialisasi hukum di masyarakat	Seringnya terjadi konflik terkait permasalahan tanah
3	Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang di Dusun maupun Desa

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Pencapaian Visi Misi

Visi : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara bertumpu padapariwisata yangdidukung oleh pertanian dan perikanan				
No	Misi dan program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima	Terbatasnya SDM yang memiliki integritas dan kompetensi serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.	Topografi/kondisi wilayah serta sarana/ prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan.	Memiliki potensi yang dapat dikelola serta kebijakan pemerintah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tahun 2019-2024 adalah:

VISI : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan.

MISI :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan;
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2024 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao mendukung visi dan misi tersebut di atas, terutama pada *Misi Keempat* : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima. Sebagai bahan telaahan terhadap Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2019-2024 dilakukan identifikasi beberapa permasalahan, beserta faktor penghambat dan pendorong pelaksanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao.

Faktor Penghambat :

1. Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
2. Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
3. Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;

4. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

Faktor Pendorong :

1. Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
2. Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
3. Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bapenas dan Renstra Bapelitbangda Provinsi NTT

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bapenas

Sesuai pedoman yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa penyusunan Renstra OPD perlu memperhatikan Renstra Kementerian dan Lembaga. Untuk itu renstra Kecamatan Landu Leko perlu melakukan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas menetapkan dua tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu: Terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan empat faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber aya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja. Beberapa sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas yaitu:

1. Terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas" adalah:
   a. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
   b. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan *(stakeholders)* terhadap RPJMN;
   c. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan *(stakeholders)*terhadap RKP.

2. Terlaksananya Penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan Pembangunan Nasional adalah: persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden.

3.3.2. Telaahan Renstra Bapelitbangda Provinsi NTT

Dokumen Renstra Bapelitbangda Provinsi NTT merupakan bahan acuan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda Provinsi NTT dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan kepemerintahan yang baik *(good governance).* maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bapelitbang sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi demi menghasilkan informasi dan data dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi; Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang, urusan dan lintas sektor demi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
3. Optimalisasi kelembagaan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas;
4. Konsistensi antar dokumen perencanaan;
5. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel.

Untuk mewujudkan lembaga perencana yang handal, kredibel, dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara, maka permasalahan pelayanan Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao berdasarkan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	**Rencana strategis (Renstra) Kemendagri**	**Permasalahan Pelayanan**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
1	2	3	4	5
1.	Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas pengelolaan keuangan, Kualitas dan akuntabilitas pemerintahan desa, Kapasitas dan profesionalisme	Kurangnya disiplin/kesadaran aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta minimnya sarana dan prasarana yang ada.	Kompetensi dan Sumber Daya Aparatur yang tidak mendukung menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik	Bimtek dan Motivasi serta metode kerja yang sistematik sesuai pembagian tupoksi

Tabel 3.4.
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Landu Leko berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.

NO	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tupoksi OPD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pengembangan Pariwisata,Hutan Produksi, Budidaya Pertanian dan Holtikultura, Budidaya Peternakan,dan pengembangan Pemukiman	Dalam hal pemberian layanan selama ini sudah sesuai dengan prosedur namun mendukung rencana tercapainya pembangunan pemerintah kabupaten yang tertuang dalam RTRW, Kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengacu pada arah kebijakan yang	Kurangnya koordinasi OPD terkait dengan kecamatan dan tidak ada sosialisasi tentang aturan/regulasi yang berhubungan dengan RTRW/KLHS serta pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat	Komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW dan KLHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013, tanggal 21 September 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao 2013 – 2033.

Didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan kesesuaian dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasilguna dan berdayaguna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang, dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi:

1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
2. Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
3. Pengendalian Pemenfaatan Ruang Wilayah Kabupaten. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
3. Perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten Rote Ndao;
4. Penetapan kawasan strategis;
5. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Rote Ndao;
6. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor; dan
7. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Di bidang lingkungan hidup, pemerintah juga sudah menerbitkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana didalamnya mengamanatkan kewajiban untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RTRW Kabupaten. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten terhadap kondisi lingkungan hidup, termasuk di dalamnya rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program, serta rekomendasi-rekomendasi perbaikan pengambilan keputusan untuk menjamin pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten mempunyai kedudukan strategis dalam pelaksanaan program – program pembangunan di daerah. Pembangunan akan berjalan optimal salah satunya dipengaruhi oleh adanya perencanaan yang berkualitas. Sebagai institusi perencanaan pembangunan di daerah dan sejalan dengan Visi dan Misi Bapelitbang Kabupaten, maka perencanan pembangunan di daerah dilaksanakan secara sinergis dengan RTRW Kabupaten Rote Ndao, baik yang menyangkut rencana struktur ruang

maupun rencana pola ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah sebagai alat dalam mengkoordinasikan, merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program sektoral. Adanya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Kabupaten, akan memperkuat sinergisitas dan singkronisasi wilayah dalam menserasikan penataan ruang daerah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Gambaran pelayanan Kecamatan landu Leko Kabupaten Rote Ndao

   Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Kecamatan Landu Leko dihadapkan pada isu strategis antara lain :

   a. Belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
   b. Masih lemahnya system pendataan/informasi/data pembangunan daerah
   c. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas serta pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan belum maksimal sesuai perkembangan zaman.

2. Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas

   Terdapat beberapa faktor penghambat didalam pencapaian sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas, antara lain:

   a. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan.
   b. Masih adanya kesenjangan pemahaman antar para pemangku kepentingan terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan.

3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao;

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.

4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Kecamatan Kabupaten Rote Ndao;

   Saran dan tindaklajut dari hasil penyusunan KLHS adalah:

   a. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao harus menyediakan program updating data dan informasi daerah agar dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan KLHS;
   b. Isu yang ada masih sangat banyak, sehingga pada kesempatan lain perlu untuk melakukan identifikasi isu strategis dengan lebih tajam;

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Landu Leko adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao yaitu:

1. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas ASN Kecamatan Landu Leko dalam mendukung pelaksanaan tugas perencanaan penelitian dan pengembangan;
2. Belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
3. Masih lemahnya sistem pendataan/informasi/data pembangunan daerah
4. Penerapan perencanaan berbasis *e-Planning*
5. Belum optimalnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi Merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, aspiratif, inovatif dan produktif. Visi tersebut menentukan arah dan tujuan perencanaan Kabupaten Rote Ndao sekaligus menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan menjadi komitmen seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan perencanaan tersebut. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dalam bernegara. Oleh karena itu diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Visi Bupati Rote Ndao yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 yaitu : **"Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan".** Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi, maka Kecamatan Landu Leko mempedomani misi ke-4 yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 sebagai berikut : **" Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima".**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Landu Leko

4.1.1. Tujuan

Tujuan Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao dirumuskan untuk menjabarkan misi keempat sesuai RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsinbilitas pelayanan publik

4.1.2. Sasaran

Sasaran yang dicapai oleh Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao antara lain :

1. Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik

Tujuan dan sasaran Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao beserta indikator kinerjanya disajikan dalam table 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Landu Leko Kab. Rote Ndao

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik	Meningkatkan transparansi dan responsibilitas pelayanan publik	1. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100	100	100	100	100
		2. Persentase PKK yang Mendapatkan Pembinaan	100	100	100	100	100

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, yaitu meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan 2 sasaran antara lain: meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah dan meningkatnya transparansi dan responsibilitas pelayanan publik. Tujuan dan sasaran ini mendukung tujuan meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik dan sasaran keterpaduan aplikasi layanan umum unsur SPBE pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Kecamatan Landu Leko menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Strategi Jangka Menengah Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Transparansi Perencanaan
2. Meningkatatkan kualitas pelayanan publik

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sesuai dengan tujuan, sasaran dan strategi Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan, maka arah kebijakannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perencanaan yang transparan berbasis e-planning
2. Meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa
3. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan seperti pada tabel 5.1

Tabel 5.1 **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**			
VISI : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT Secara Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan			
MISI IV : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
- Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik	- Meningkatnya transparansi dan responsibilitas pelayanan publik	- Transparansi Perencanaan	- Meningkatkan perencanaan yang transparan berbasis e-planning
			- Meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa
		- Meningkatkan kualitas pelayanan publik	- Penataan dan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1

Rencana program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Kecamatan Landuleko Kabupaten Rote Ndao

MATRIKS PERTAMA MEMAKAI NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN LAMA TAHUN 2019 & 2020

TUJUAN	SASARAN	KODE							PROGRAM/ KEGIATAN			Indikator Kinerja, Tujuan sasaran program (autcam) dan kegiatan (auput)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	LOKASI
														2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode renstra OPD			
														Target	(Rp)	Target	(Rp)	Kinerja	(Rp.)		
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan Landu Leko	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan**	**4**	**01**	**4**	**01**	**19**	**01**		**PROGRAM :**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		**MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**100%**		**259,292,000.00**		**307,606,000.00**		**566,898,000.00**	**KEC. LANDULEKO**	**KEC. LANDULEKO**
		4	01	4	01	19	01	01	KEGIATAN:	1	Penyediaan Barang dan Jasa Kantor	Tersedianya jasa surat-menyurat, komunikasi, sumberdaya air dan listrik, alat tulis kantor, lingkungan kantor yang bersih, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12	27,713,000.00	12	50,456,000	24	78,169,000.00	KEC. LANDULEKO	KEC. LANDULEKO
		4	01	4	01	19	01	02		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	-	2	10,000,000	14	10,000,000.00	KEC. LANDULEKO	KEC. LANDULEKO
		4	01	4	01	19	01	03		3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional, pemeliharaan kendaraan dinas	12	12	40,683,000.00	6	67,471,000	18	108,154,000.00	KEC. LANDULEKO	KEC. LANDULEKO
		4	01	4	01	19	01	04		4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan perkantoran	12	12	42,096,000.00	5	39,720,000	17	81,816,000.00	KEC. LANDULEKO	KEC. LANDULEKO
		4	01	4	01	19	01	06		5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pakaian motif daerah khusus hari-hari tertentu, bimtek bagi aparatur	12	12	16,500,000.00	1	8,619,000	13	25,119,000.00	KEC. LANDULEKO	KEC. LANDULEKO
		4	01	4	01	19	01	07		6	Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi tugas dalam wilayah Provinsi NTT dan Luar Daerah	12	12	132,300,000.00	180	131,340,000	192	263,640,000.00	KEC. LANDULEKO	KUPANG, JAKARTA
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan	**4**	**01**	**4**	**01**	**19**	**24**		**PROGRAM :**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKTAN**		**Meningkatnya pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan**	**100%**		**135,708,000.00**		**137,394,000.00**		**273,102,000.00**	**KEC. LANDULEKO**	**KEC. LANDULEKO**
		4	01	4	01	19	24	01	KEGIATAN:	1	Diklat Pasukan Pengibar Bendera	Tersedianya Pasukan Pengibar Bendera	40 Orang	12	37,500,000.00	72	-	84	37,500,000.00	KEC. LANDULEKO	KEC. LANDULEKO
		4	01	4	01	19	24	02		2	Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan PKK dan DWP di Kecamatan Landu Leko	45 Orang	12	34,500,000.00	31	43,000,000	43	77,500,000.00	KEC. LANDULEKO	KEC. LANDULEKO
		4	01	4	01	19	24	03		3	Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	Tersedianya pelayanan kemasyarakatan	12	12	36,201,000.00	12	71,825,000	24	108,026,000.00	KEC. LANDULEKO	KEC. LANDULEKO
		4	01	4	01	19	24	04		4	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	Tersedianya usulan prioritas desa	5	12	27,507,000.00	7	22,569,000	19	50,076,000.00	KEC. LANDULEKO	KEC. LANDULEKO
												Jumlah			**395,000,000**		**445,000,000**				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Kepmendagri No 050-378 Tahun 2020

TUJUAN	SASARAN	KODE		PROGRAM/ KEGIATAN		Indikator Kinerja, Tujuan sasaran program (autcam) dan kegiatan (auput)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	LOKASI
								2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode renstra OPD			
								Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Kinerja	(Rp.)		
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan Landu Leko	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan**	**7 01 01**		**PROGRAM :**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya Pelayanan Administrsi Perkantoran**	**100%**	**100**	**1,278,901,136.00**	**100**	**1,278,901,136.00**	**100**	**1,342,846,192.80**	**100**	**1,409,988,502.44**	**400**	**4,524,045,792.92**	**KEC. LANDULEKO**	**KAB. ROTE NDAO**
						Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**400**			
		7 01 01 2.01		**KEGIATAN :**	**1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**18 Dokumen**	**18**	**74,600,000.00**	**18**	**74,600,000.00**	**18**	**78,330,000.00**	**18**	**82,246,500.00**	**72**	**309,776,500.00**	**KEC. LANDULEKO**	**KAB. ROTE NDAO**
		7 01 01 2.01 01		SUB KEGIATAN :	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Penja PD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD, Perubahan DPA PD	11 Dokumen	11	71,100,000.00	11	71,100,000.00	11	74,655,000.00	11	78,387,750.00	44	295,242,750.00	KEC. LANDULEKO	KAB. ROTE NDAO
		7 01 01 2.01 07		SUB KEGIATAN :	1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan Evaluasi Renja per triwulan	7 Dokumen	7	3,500,000.00	7	3,500,000.00	7	3,675,000.00	7	3,858,750.00	28	14,533,750.00	KEC. LANDULEKO	KAB. ROTE NDAO
		7 01 01 2.02		**KEGIATAN :**	**2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12**	**1,014,875,206.00**	**12**	**1,014,875,206.00**	**12**	**1,065,618,966.30**	**12**	**1,118,899,914.62**	**48**	**4,214,269,292.92**	**KEC. LANDULEKO**	**KAB. ROTE NDAO**
		7 01 01 2.02 01		SUB KEGIATAN :	2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	13 Orang	13	983,435,206.00	13	983,435,206.00	12	1,032,606,966.30	12	1,084,237,314.62	50	4,083,714,692.92	KEC. LANDULEKO	KAB. ROTE NDAO
		7 01 01 2.02 03		SUB KEGIATAN :	2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	12 Bulan	12	31,440,000.00	12	31,440,000.00	12	33,012,000.00	12	34,662,600.00	48	130,554,600.00	KEC. LANDULEKO	KAB. ROTE NDAO
		7 01 01 2.03		**KEGIATAN :**	**3 Administrasi Barang Milik Darah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**100**	**10,000,000.00**	**100**	**10,000,000.00**	**100**	**10,500,000.00**	**100**	**11,025,000.00**	**100**	**41,525,000.00**	**KEC. LANDULEKO**	**KAB. ROTE NDAO**
		7 01 01 2.03 02		SUB KEGIATAN :	3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Honor Pengelola BMD SKPD	12 Bulan	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,500,000.00	12	11,025,000.00	48	41,525,000.00	KEC. LANDULEKO	KAB. ROTE NDAO
		7 01 01 2.05		**KEGIATAN :**	**4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**100**	**45,000,000.00**	**100**	**45,000,000.00**	**100**	**47,250,000.00**	**100**	**49,612,500.00**	**100**	**186,862,500.00**	**KEC. LANDULEKO**	**KAB. ROTE NDAO**
		7 01 01 2.05 03		SUB KEGIATAN :	4.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah	3 Orang	3	45,000,000.00	3	45,000,000.00	3	47,250,000.00	3	49,612,500.00	12	186,862,500.00	KEC. LANDULEKO	KAB. ROTE NDAO
		7 01 01 2.06		**KEGIATAN :**	**5 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**100**	**64,776,430.00**	**100**	**64,776,430.00**	**100**	**68,015,251.50**	**100**	**71,416,014.08**	**100**	**268,984,125.58**	**KEC. LANDULEKO**	**KAB. ROTE NDAO**
		7 01 01 2.06 02		SUB KEGIATAN :	5.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12	9,996,430.00	12	9,996,430.00	12	10,496,251.50	12	11,021,064.08	48	41,510,175.58	KEC. LANDULEKO	KAB. ROTE NDAO
		7 01 01 2.06 05		SUB KEGIATAN :	5.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12	11,650,000.00	12	11,650,000.00	12	12,232,500.00	12	12,844,125.00	48	48,376,625.00	KEC. LANDULEKO	KAB. ROTE NDAO
		7 01 01 2.06 06		SUB KEGIATAN :	5.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12	900,000.00	12	900,000.00	12	945,000.00	12	992,250.00	48	3,737,250.00	KEC. LANDULEKO	KAB. ROTE NDAO
		7 01 01 2.06 07		SUB KEGIATAN :	5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat Tulis Kantor dan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12	14,683,000.00	12	14,683,000.00	12	15,417,150.00	12	16,188,007.50	48	60,971,157.50	KEC. LANDULEKO	KAB. ROTE NDAO
		7 01 01 2.06 09		SUB KEGIATAN :	5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya koordinasi/Konsultasi Tugas ke Luar Daerah	5 Kali Perjalanan	5	27,547,000.00	5	27,547,000.00	5	28,924,350.00	5	30,370,567.50	20	114,388,917.50	KEC. LANDULEKO	KUPANG, JAKARTA
		7 01 01 2.08		**KEGIATAN :**	**6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**12**	**22,306,000.00**	**12**	**22,306,000.00**	**12**	**23,421,300.00**	**12**	**24,592,365.00**	**48**	**92,625,665.00**	**KEC. LANDULEKO**	**KEC. LANDULEKO**
		7 01 01 2.08 01		SUB KEGIATAN :	6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12	924,000.00	12	924,000.00	12	970,200.00	12	1,018,710.00	48	3,836,910.00	KEC. LANDULEKO	KAB. ROTE NDAO
		7 01 01 2.08 02		SUB KEGIATAN :	6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12	21,382,000.00	12	21,382,000.00	12	22,451,100.00	12	23,573,655.00	48	88,788,755.00	KEC. LANDULEKO	KAB. ROTE NDAO
		7 01 01 2.09		**KEGIATAN :**	**7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**100%**	**100**	**47,343,500.00**	**100**	**47,343,500.00**	**100**	**49,710,675.00**	**100**	**52,196,208.75**	**100**	**196,593,883.75**	**KEC. LANDULEKO**	**KAB. ROTE NDAO**
		7 01 01 2.09 02		SUB KEGIATAN :	7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional, Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional	6 Unit	6	42,643,500.00	6	42,643,500.00	6	44,775,675.00	6	47,014,458.75	24	177,077,133.75	KEC. LANDULEKO	KAB. ROTE NDAO
		7 01 01 2.09 09		SUB KEGIATAN :	7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Gedung	1	4,700,000.00	1	4,700,000.00	1	4,935,000.00	1	5,181,750.00	4	19,516,750.00	KAB. ROTE NDAO	KAB. ROTE NDAO

TUJUAN	SASARAN	KODE							PROGRAM/ KEGIATAN			Indikator Kinerja, Tujuan sasaran program (autcam) dan kegiatan (auput)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	LOKASI
														2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode renstra OPD			
														Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Kinerja	(Rp.)		
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan	**7**	**01**	**03**					**PROGRAM :**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)**	**100%**	**100**	**66,000,000.00**	**100**	**66,000,000.00**	**100**	**69,300,000.00**	**100**	**72,765,000.00**	**100**	**274,065,000.00**	**KEC. LANDULEKO**	**KAB ROTE NDAO**
		7	**01**	**03**	**2.01**				**KEGIATAN :**	**8**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya koordinasi pemberdayaan desa**	**28**	**28**	**66,000,000.00**	**28**	**66,000,000.00**	**28**	**69,300,000.00**	**28**	**72,765,000.00**	**112**	**274,065,000.00**	**KEC. LANDULEKO**	**KAB ROTE NDAO**
		7	01	03	2.01	01			SUB KEGIATAN :	8.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersedianya Usulan Prioritas (usulan)	28	28	23,000,000.00	28	23,000,000.00	28	24,150,000.00	28	25,357,500.00	112	95,507,500.00	KEC. LANDULEKO	KAB ROTE NDAO
		7	01	03	2.01	03			SUB KEGIATAN :	8.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan	45 Orang	45	43,000,000.00	45	43,000,000.00	45	45,150,000.00	45	47,407,500.00	180	178,557,500.00	KEC. LANDULEKO	KAB ROTE NDAO
		7	**01**	**04**					**PROGRAM :**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase layanan pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan Tidak Berijin pada jalan poros utama Kecamatan (%)**	**100%**	**100**	**67,450,000.00**	**100**	**67,450,000.00**	**100**	**70,822,500.00**	**100**	**74,363,625.00**	**100**	**280,086,125.00**	**KEC. LANDULEKO**	**KAB ROTE NDAO**
		7	**01**	**04**	**2.-01**				**KEGIATAN :**	**9**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**12 Bulan**	**12**	**67,450,000.00**	**12**	**67,450,000.00**	**12**	**70,822,500.00**	**12**	**74,363,625.00**	48	280,086,125.00	KEC. LANDULEKO	KEC. LANDULEKO
		7	01	04	**2.-01**	01			SUB KEGIATAN :	9.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Penanganan Pengaduan Masyarakat	12 Bulan	12	67,450,000.00	12	67,450,000.00	12	70,822,500.00	12	74,363,625.00	48	280,086,125.00	KEC. LANDULEKO	KEC. LANDULEKO
		7	**01**	**05**					**PROGRAM :**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Cakupan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum (%)**	**100%**	**100**	**30,999,100.00**	**100**	**30,999,100.00**	**100**	**32,549,055.00**	**100**	**34,176,507.75**	**100**	**128,723,762.75**	**KEC. LANDULEKO**	**KEC. LANDULEKO**
		7	**01**	**05**	**2.-01**				**KEGIATAN :**	**10**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**100**	**30,999,100.00**	**100**	**30,999,100.00**	**100**	**32,549,055.00**	**100**	**34,176,507.75**	**100**	**128,723,762.75**	**KEC. LANDULEKO**	**KEC. LANDULEKO**
		7	01	05	2.-01	01			SUB KEGIATAN :	10.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tersedianya Pasukan Pengibar Bendera	40 Orang	40	30,999,100.00	40	30,999,100.00	40	32,549,055.00	40	34,176,507.75	160	128,723,762.75	KEC. LANDULEKO	KEC. LANDULEKO
												Jumlah			**1,443,350,236**		**1,443,350,236**		**1,515,517,748**		**1,591,293,635**		**5,206,920,681**		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja merupakan sesuatu yang dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Landu Leko, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Landu Leko Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Tahun Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		-2019	2020	2021	2022	2023	2024	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
1	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Perubahan Renstra dilaksanakan karena untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renstra Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh Aparatur Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Perubahan Renstra Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semoga penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Rote Ndao 2019-2024, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao.

Nolaer, 28 Desember 2021
Camat Landu Leko

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LANDU LEKO

Jostaf Faah, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 196403111986031014